

PADJADJARAN

jurnal ilmu hukum
journal of law

PENDAPAT AHLI TERHADAP PERMOHONAN YUDISIAL REVIEW
UU NO. 30/2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Komariah E. Sapardjaja

DEBIROKRATISASI DAN DEREGULASI DALAM SISTEM PERIZINAN
DI INDONESIA
Zainal Muttaqin

URGENSI KONSEP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ida Nurlinda

PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Dewi Kania Sugiharti

IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
(*CLASS ACTION*) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Imamulhadi

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
BERDASARKAN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS*
SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Laina Rafianti

Zainal Muttaqin

PADJADJARAN

JURNAL ILMU HUKUM

(Journal of Law)



PENDAPAT AHLI TERHADAP PERMOHONAN YUDISIAL REVIEW
UU NO. 30/2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Komariah E. Sapardjaja

DEBIROKRATISASI DAN DEREGULASI DALAM SISTEM PERIZINAN
DI INDONESIA

Zainal Muttaqin

URGENSI KONSEP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ida Nurlinda

PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Dewi Kania Sugiharti

IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
(*CLASS ACTION*) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Imamulhadi

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
BERDASARKAN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS*
SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Laina Rafianti

Jurnal Padjadjaran

Jurnal Ilmu Hukum

(Journal of Law)

Terbit tiap bulan April, Agustus, Desember

Motto:

*If what the Scholar says is not subject to criticism, it might as well be left unsaid
(Philip C. Jessup)*

Nara Sumber

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M.
Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri M, S.H.
Prof. Dr. H.E. Saefullah, S.H.,LL.M.
Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos.,LL.M.
Prof. Dr. Mieke Komar, S.H.,M.CL.,CN.
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.
Prof. Dr. H. Otje Salman Soemadiningrat, S.H.
Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.
Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.
Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.
Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M.
Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., MH.
Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,MH.
Prof. Dr. Komariah Emong S, S.H.
Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.
Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,MH.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H.,MH.	Ketua
Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D	Wakil Ketua
Elisatris Gultom, S.H.,MH.	Sekretaris
Anita Afriana, S.H.	Bandahara
Ahmad Gusman Catur S, S.H.,LL.M.	Anggota
Artaji, S.H.,MH.	Anggota
Wanodyo Sulistyani, S.H.,MH.	Anggota
Citta Prasida, S.H.	Anggota
Rachminawati, S.H.	Anggota
Inna Junaenah, S.H.	Anggota
Pupung Faisal, S.H.	Anggota
Rahayu Prasetianingsih, S.H.	Anggota

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Gedung Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad Lt. 2
Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung 40132, Tlp / Fax : 62-22-2508514
SIT : No. 061 / SK / Ditjen. PPG / SIT /1976
Tanggal 6 April 1976

DAFTAR ISI

- PENDAPAT AHLI TERHADAP PERMOHONAN YUDISIAL REVIEW UU NO. 30/2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Komariah E. Sapardjaja Hal 1-6
- DEBIROKRATISASI DAN DEREGULASI DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA
Zainal Muttaqin Hal 7-11
- URGENSI KONSEP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ida Nurlinda Hal 12-29
- PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Dewi Kania Sugiharti Hal 30-43
- IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Imamulhadi Hal 44-55
- PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Laina Rafianti Hal 56-68
- RESENSI BUKU
 - LEMBAGA NEGARA, dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.)
Inna Junaenah Hal 69-71
 - PERGESERAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT KONSTITUSI DI INDONESIA: Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945 (Sayuti Una, MH)
Inna Junaenah Hal 72-74
- Para penulis Hal 76

Jurnal Hukum Padjadjaran diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sebagai media pengembangan ilmu hukum. Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa hasil penelitian, makalah seminar, resensi buku atau karya ilmiah lainnya sepanjang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media lain. Tulisan dikirim dalam bentuk naskah tercetak minimal 15 halaman diketik spasi ganda dan disertai riwayat hidup serta abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maksimal 150 kata dengan disertai disket.

Dimuatnya suatu tulisan, artikel atau *book report* dalam jurnal ini tidak berarti redaksi ataupun Universitas Padjadjaran menyetujui kesimpulan-kesimpulan yang dianut penulis.

DEBIROKRATISASI DAN DEREGULASI DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA¹

Zainal Muttaqin

Abstract

License as a form of government's authority which aims to control, protect, arrange, select, and prevent danger from certain activities has a crucial role in planning and implementing national development process, especially in the environmental sector which embraces, among others, the availability and sustainability of natural resources, tourism, industry, commerce, health, and banking. Alongside with economic development and district autonomy, licensing needs more particular attention. This article discusses the need of licensing deregulation in the form of Law Review both in central and district government to support development program and improve services to the society.

1. Perizinan di Indonesia

Izin merupakan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh administrasi Negara. Izin sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis mempunyai berbagai tujuan antara lain, yaitu mengarahkan/mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu, melindungi obyek tertentu, mengatur distribusi benda langka, seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu.²

Dari berbagai tujuan inilah, muncul berbagai izin di berbagai sektor seperti lingkungan hidup, kepariwisataan, industri, perdagangan, kesehatan, perbankan dan sebagainya.

Keadaan ini menyebabkan adanya banyak/berbagai instansi/pejabat administrasi negara yang berwenang untuk menerbitkan izin sesuai dengan bidang masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan undangan.

Bahkan satu jenis izin saja, misalnya izin usaha, dikenal dalam berbagai bidang. Dikenal izin usaha perdagangan, izin usaha industri (PP13/1995), izin Usaha Perbankan, izin Usaha Pariwisata, dsb. Meskipun namanya sama yaitu

1 Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional *Debirokratisasi Sistem Perizinan Sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif*, diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Surabaya, di Hotel Shangri-la Surabaya, 25 Mei 2005.

2 N..M Spelt dan J.B.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, terjemahan Philippus M. adjon, Yuridika Surabaya, 1993, halaman 4.